

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.499 pulau. Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia, selain itu Indonesia berada diantara dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik sehingga Indonesia memiliki hasil laut, pertanian dan perkebunan yang seharusnya melimpah karena apabila ditinjau dari aspek geostrategis Indonesia merupakan negara yang sangat penting untuk menjadi lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam hayati dan non-hayati diantaranya air, mineral, logam, migas dan non migas. Sumber daya alam tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Marsetio, 2018).

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan tersebut, kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Pembangunan nasional dapat menjadi salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek politik, budaya, pertahanan dan ekonomi secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Pembangunan nasional yang baik dan merata akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Terciptanya pembangunan nasional sesuai dengan tujuan yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan adanya tujuan tersebut, diperlukan kemauan, kebutuhan dan kesadaran masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dan berdampak positif untuk lingkungan. Pemerintah sebagai pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan seluruh rakyat, dibantu masyarakat yang bergerak secara mandiri melalui kegiatan penyuluhan yang dapat membantu jalannya pembangunan menjadi lebih mudah.

Salah satu tujuan pembangunan nasional diatas adalah menciptakan kesejahteraan umum, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum layak menjadi layak dan sesuai dengan sila ke-5 pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional dapat diarahkan melalui pembangunan daerah sesuai dengan akar masalah dan potensi daerah masing-masing daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan tahunan sektor nasional di daerah.

Berdasarkan pasal 18 ayat 2 UUD 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah. Dapat disimpulkan

bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan melaksanakan atas dasar asas otonomi. Dengan mengoptimalkan sistem otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai apa yang dimiliki dan dibutuhkan daerahnya agar dapat membangun struktur daerah yang efektif. Dalam aspek ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan untuk mengelola potensi yang ada menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan yang baru, memudahkan perizinan usaha dan membangun infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah (Haris, 2005). Pemberlakuan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Adanya pembangunan nasional tentu menjadi solusi atas masalah yang dihadapi suatu negara, salah satunya masalah kemiskinan. Dibalik sumber daya alam yang melimpah, faktanya kemiskinan masih menjadi masalah kompleks dan berkepanjangan. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat namun masih belum mampu memberikan perubahan yang besar. Pembangunan yang dilakukan selama ini belum diikuti pertumbuhan yang merata dan adil.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan, papan. Untuk memetakan masalah kemiskinan terdapat dua hal yaitu permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dalam segi permintaan menjelaskan pendapatan di

negara miskin yang rendah karena terbatasnya ketersediaan barang mengakibatkan tingkat penanaman modal menjadi terbatas, sehingga produktivitasnya juga rendah. Sedangkan dari segi penawaran, rendahnya minat masyarakat untuk menabung karena pendapatan yang rendah sehingga kemampuan untuk berinvestasi rendah akibatnya terjadi kekurangan modal (Andhykha dkk, 2018). Hal ini membuktikan bahwa adanya pembangunan nasional belum bisa terserap secara merata di masyarakat. Tingkat kesejahteraan hidup masyarakat tertentu dapat dikategorikan belum layak dan belum mendapatkan keadilan. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah maupun individu untuk membantu mengurangi kemiskinan. Namun implementasinya belum dirasakan masyarakat secara adil dan merata.

Menurut Basuki & Prawoto, (2015) besarnya nilai produk nasional bruto rill menggambarkan kenaikan taraf hidup masyarakat. Artinya, jika terjadi kenaikan taraf hidup masyarakat tingkat kemiskinan menurun. Laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah belum tentu menjamin kesejahteraan tinggi untuk masyarakat, perlu dilakukan perbandingan data dengan daerah lain misalnya dengan pendapatan perkapita, struktur perekonomian pada daerah tersebut cenderung agraris atau industri. Berdasarkan data tiap sektor dapat menjadi acuan seberapa besar peranan produk domestik regional bruto secara keseluruhan.

Dalam firman Allah Quran Surat an-Nisa ayat 58 yang kandungannya berisi tentang amanah dan hak kepada yang berhak, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Pada sebuah HR. Muslim, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa beliau memberikan janji kepada orang yang berlaku adil dalam sabdanya sebagai berikut :

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada diatas punggung yang terbuat dari cahaya disebelah kanan Allah azza wa jalla dan kedua sisinya dalam keadaan baik, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dalam keluarga, dan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka”

Dari kedua ayat dan hadist tersebut, hakikatnya Islam telah memberikan pedoman bahwa dalam kehidupan kita sudah seharusnya memberikan hak kepada setiap manusia secara merata, adil, tidak sewenang-wenang dan tidak merampas hak dari suatu kaum yang lemah. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi khalifah dibumi, dengan diberikan akal sehat, ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pemerintah yang berperan sebagai wakil rakyat diharapkan menegakkan keadilan dan memberikan hak penghidupan yang sama bagi setiap rakyatnya.

Sesuai dengan judul pada penelitian ini *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2016-2019”*. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Di Indonesia Tahun 2018 – 2019
(Juta Jiwa)

No	Wilayah	2018	2019	Presentase (%)
1	Pulau Jawa	149.637	151.062	55,94
2	Pulau Sumatera	54.168	54.882	21,73
3	Pulau Sulawesi	19.462	19.700	7,43
4	Pulau Kalimantan	16.210	16.492	6,13

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas, telah terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2018-2019 di Indonesia. Pulau Jawa termasuk wilayah yang mempunyai penduduk paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 151.062 juta jiwa dengan presentase sebesar 55,94%. Dibandingkan dengan empat pulau terbesar di Indonesia lainnya diantaranya adalah Pulau Sumatera sebesar 54.882 juta jiwa dengan presentase sebesar 21,73%, Pulau Sulawesi sebesar 19.700 juta jiwa dengan presentase sebesar 7,43%, dan Pulau Kalimantan sebesar 16.492 juta jiwa dengan presentase sebesar 6.13%.

Menurut Hudiyanto, (2017) jumlah penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, namun disisi lain jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah baru yang menghambat pembangunan nasional. Salah satu masalah yang akan muncul jika terjadi kepadatan penduduk adalah tingkat kemiskinan. Karena apabila jumlah penduduk bertambah dengan tingkat kepadatan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan menimbulkan kemiskinan.

Berikut data terkait jumlah penduduk miskin di pulau Jawa tahun 2017-2019 yaitu :

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019
(Ribu Jawa)

No	Wilayah	2017	2018	2019
1	DKI Jakarta	393,13	372,00	362,30
2	Jawa Barat	4.168,44	3.615,79	3.399,16
3	Jawa Tengah	4.197,49	3.867,42	3.679,40
4	DIY	488,53	460,10	448,47
5	Jawa Timur	4.617,01	4.332,59	4.112,25
6	Banten	675,04	661,36	654,46

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penduduk miskin yang ada di pulau Jawa terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 4.112,25 ribu jiwa dan berikutnya diikuti oleh Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 3.679,40 ribu jiwa. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang memiliki infrastruktur dan potensi daerah baik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seharusnya keunggulan daerah tersebut dapat dimaksimalkan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (2020) jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, pada tahun 2019 penduduk miskin dipedesaan 2.077,15 ribu jiwa dan diperkotaan 1.602,26 ribu jiwa. Terbukti dengan angka kemiskinan paling tinggi ada di

Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang dan Purbalingga. Artinya pembangunan nasional yang dilakukan belum tersebar secara merata di Jawa Tengah. Salah satu usaha untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai berikut :

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan
Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten	2018	2019	%
1	Brebes	31.050.889,67	32.869.150,35	5,85
2	Wonosobo	13.065.841,65	13.798.836,28	5,61
3	Kebumen	18.777.048,50	19.825.062,62	5,58
4	Pemalang	17.268.888,82	18.270.189,13	5,79
5	Purbalingga	16.458.708,49	17.387.941,84	5,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto merupakan bagian dari perhitungan pendapatan disektor daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut. Data diatas menunjukkan setiap daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Beberapa kabupaten diatas merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penjelasan diatas, diperkuat penelitian dari Wiguna & Sakti, (2012) bahwa pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan memberikan hasil negative dan signifikan terhadap Kemiskinan.

Selain dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, faktor lain yang dapat menjadi tolok ukur untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Belanja daerah memiliki manfaat sebagai saran untuk meningkatkan sumber daya alam maupun manusia yang ada di suatu daerah agar dapat menciptakan produktivitas masyarakat untuk bekerja. Apabila belanja daerah dialokasikan secara maksimal dan sesuai target, diharapkan produktivitas semakin tinggi sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 1.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019
(Triliun Rupiah)

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan (%)
1	2016	80.510.004.351	-
2	2017	82.460.035.621	2,42
3	2018	83.142.694.041	0,82
4	2019	82.938.404.995	-0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik realisasi Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2016-2018. Pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 83.142.694.041 ribu rupiah dan Pengeluaran Pemerintah terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 80.510.004.351 ribu rupiah. Pada tahun 2016-2018 angka pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 angka pengeluaran Pemerintah mengalami penurunan. Pengeluaran pemerintah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan ikut menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini

diperkuat penelitian dari Nurdin & Sari, (2018) bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya perbaikan infrastuktur untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan daerahnya sangat beragam diantaranya dari segi pertanian, perkebunan, wisata dan industri. Adanya investasi sangat diperlukan masyarakat untuk memenuhi infrastuktur yang belum baik misalnya kondisi jalan, listrik, dan sekolah. Dengan menggali potensi tersebut, pemerintah dapat menarik para investor untuk membantu pembangunan daerah secara bertahap, terencana dan terukur.

Tabel 1.5
Realisasi Nilai Investasi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019
(Juta Rupiah)

No	Tahun	Investasi	Presentase (%)
1	2016	25.101.149	-
2	2017	37.089.335	47,75
3	2018	26.847.543	-2,76
4	2019	21.377.921	-2,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dapat diketahui dalam empat tahun terakhir pertumbuhan realisasi Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 37.089.335.1 juta rupiah. Selanjutnya menurun pada tahun 2018 sebesar 26.847.542.9 juta rupiah dan pada tahun 2019 menurun kembali sebesar 21.377.921 juta rupiah. Berdasarkan tabel diatas, nilai investasi dari tahun 2017-2019 mengalami

penurunan. Diasumsikan karena investasi menurun dapat mempengaruhi angka kemiskinan, hal ini sejalan dengan penelitian dari Paramita & Purbadharmaja, (2015) bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain Investasi, laju pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh terhadap Kemiskinan mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia urutan ketiga. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan semakin banyak. Namun hal ini belum dapat dipastikan karena kepadatan penduduk suatu daerah dan terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan seseorang tidak bisa bekerja. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi angka kemiskinan karena jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan tidak seimbang.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2019
(Juta Jiwa)

No	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
1	2016	34.019.095	0,73
2	2017	34.257.865	0,71
3	2018	34.490.835	0,68
4	2019	34.718.204	0,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Jumlah penduduk dari tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 34.019.095 juta jiwa dan pertumbuhan pada tahun 2019 sebanyak 34.718.204. Belum meratanya persebaran penduduk di Indonesia menyebabkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Berbagai upaya

telah dilakukan pemerintah namun belum cukup mampu untuk menekan angka jumlah penduduk. Tingginya tingkat migrasi yang datang setiap tahunnya, dan lapangan pekerjaan terbatas membuat masyarakat menjadi tidak produktif sehingga menyebabkan kemiskinan. Berdasarkan penelitian dari Mustika, (2011) yang memberikan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wiguna & Sakti, (2012), Nurdin & Sari, (2018), Paramita & Purbadharmaja, (2015) dan Mustika, (2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wigunda & Sakti, (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010” menggunakan metode penelitian analisis regresi linear berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel bebasnya adalah PDRB, pendidikan dan pengangguran. Penelitian ini memberikan hasil bahwa PDRB dan Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin & Sari, (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016” menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pertumbuhan

ekonomi serta pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat kemiskinan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Purbadharmaja (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali” menggunakan metode analisis jalur. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel bebasnya adalah investasi dan pengangguran. Penelitian ini memberikan hasil bahwa investasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008” menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel bebasnya adalah PDB dan jumlah penduduk. Penelitian ini memberikan hasil bahwa PDB dan jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang serta beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara PDRB,

pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah penduduk. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya, rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019 ?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019 ?
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019 ?
4. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2016-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019.

3. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

5. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, kajian dan informasi untuk pemerintah dalam mengentaskan Kemiskinan di Jawa Tengah tahun berikutnya, serta menjadi pengetahuan dan referensi bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan Kemiskinan di Jawa Tengah maupun daerah lain di Indonesia.

6. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat praktis untuk pihak yang akan mengambil keputusan terkait masalah Kemiskinan agar menjadi kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dapat menambah pemikiran terhadap masalah Ekonomi Makro dan Moneter. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dalam konteks yang sama.